

ABSTRAK

Sebagai salah satu subjek pajak, PT X sebagai pemberi kerja yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya, diwajibkan pula melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas pembayaran-pembayaran tersebut sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pemotongan tersebut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Terdapat empat metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan ditanggung perusahaan, (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan di *gross-up*.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan hasil penelitian terhadap metode pemotongan PPh Pasal 21 dan dampak metode tersebut terhadap PPh Terutang PT X. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis suatu data sehingga dari data tersebut dapat diperoleh suatu gambaran mengenai objek yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dengan mempertimbangkan besarnya PPh Terutang Badan dan jumlah *Take Home Pay* karyawan, sebaiknya perusahaan menggunakan alternatif keempat, yaitu Metode pemotongan PPh Pasal 21 di *Gross-Up*, karena PPh Terutang Badan bernilai paling kecil sehingga dapat menghemat Pajak Penghasilan terutang perusahaan, namun *Take Home Pay* karyawan berjumlah paling besar, hal ini akan menguntungkan pihak perusahaan maupun karyawan.

Kata-kata kunci: PPh Pasal 21, PPh Terutang Badan, Laba Bersih, *Gross-Up*

DAFTAR ISI

	Hal.
COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Pengelompokkan Pajak	11

2.1.3 Fungsi Pajak	12
2.1.4 Dasar Pemungutan Pajak	13
2.1.5 Azas Pemungutan Pajak	14
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	17
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan	18
2.2.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	20
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	21
2.2.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan	23
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung PPh	25
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan	27
2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	29
2.3.1 Pengertian PPh Pasal 21	29
2.3.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21	30
2.3.3 Objek PPh Pasal 21	32
2.3.4 Pengecualian Objek PPh Pasal 21	34
2.3.5 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final	35
2.3.6 Pihak yang Berkewajiban untuk Memotong, Menyetor, dan Melapor	36
2.3.7 Pengurang Penghasilan Bruto yang Diperbolehkan	37
2.3.8 Biaya-biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	40
2.3.9 Besarnya Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	41

2.3.10 Tarif PPh Pasal 21	43
2.3.11 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Oleh Pemerintah ..	49
2.3.12 Penerapan Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21	50
2.4 Utang Pajak	57
2.4.1 Timbulnya Utang Pajak	57
2.4.2 Hapusnya Utang Pajak	58
2.5 Pajak Penghasilan Terutang	59
2.6 Manajemen Pajak	60
2.6.1 Definisi Manajemen Pajak	60
2.6.2 Fungsi-fungsi Manajemen Pajak	60
2.7 Penghematan Pajak	62
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	65
3.1 Objek Penelitian	65
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	63
3.1.2 Aktivitas Perusahaan	63
3.1.3 Struktur Organisasi	64
3.2 Metode Penelitian	69
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Metode Pemotongan PPh Pasal 21 yang Dijalankan Perusahaan	73

4.2 Data PT X	73
4.3 Alternatif Pemilihan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21....	74
4.4 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21	76
4.4.1 PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai/Pemberi Kerja	76
4.4.2 PPh Pasal 21 Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak	76
4.4.3 PPh Pasal 21 di <i>gross-up</i>	77
4.5 Pemilihan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Dalam Menunjang Penghematan PPh Terutang Badan	85
4.6 Pemilihan Metode Pemotongan PPh Pasal 21	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 4.1	Daftar Gaji dan Upah Karyawan PT X 76
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode Ditanggung Pemberi Kerja atau Ditanggung Karyawan 82
Tabel 4.3	Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode Tunjangan Pajak oleh Pemberi Kerja 83
Tabel 4.4	Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode <i>Gross-Up</i> 84
Tabel 4.5	Laporan Laba/Rugi (Metode PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan) 86
Tabel 4.6	Laporan Laba/Rugi (Metode PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja) 88
Tabel 4.7	Laporan Laba/Rugi (Metode PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan) 90
Tabel 4.8	Laporan Laba/Rugi (Metode PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>) 92
Tabel 4.9	Dampak dari PPh Pasal 21 Terutang terhadap PPh Terutang Badan, Laba Bersih Perusahaan setelah Pajak, dan <i>Take Home Pay</i> untuk setiap metode 93
Tabel 4.10	Perbandingan Keempat Metode Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, dan Biaya Komersial PT X 94

Tabel 4.11	Ikhtisar <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial, selisih Biaya Fiskal dan Biaya komersial, serta PPh Terutang	94
Tabel 4.12	Perbandingan Keempat Metode atas PPh Terutang Badan dan Laba Bersih setelah Pajak	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi PT X
- Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT X per 31 Desember 2007
- Lampiran 3 Skema Neraca PT X per 31 Desember 2007
- Lampiran 4 Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 5 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- Lampiran 6 Formulir 1770 ~ SPT Tahunan PPh WPOP
- Lampiran 7 Formulir 1770 S ~ SPT Tahunan PPh WPOP
- Lampiran 8 Formulir 1770 SS ~ SPT Tahunan PPh WPOP
- Lampiran 9 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- Lampiran 10 Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
- Lampiran 11 Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- Lampiran 12 Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 26